

Pengaruh Politik Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri Belanda: Kasus Insiden Diplomatik Belanda-Turki Tahun 2017

Nazelia Alifia Putri

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : nazelia27@gmail.com

ABSTRACT

Penolakan Pemerintah Belanda kepada dua orang Menteri Turki yang hendak menuju kota Rotterdam untuk memimpin dan mengawal pengadaaan rally kampanye referendum negaranya merupakan keputusan yang menempatkan hubungan kedua negara mengalami keretakan. Tulisan ini menganalisis alasan yang melatarbelakangi keputusan Pemerintah Belanda menolak Menteri Turki dengan menggunakan instrumen analisis yakni pendekatan struktur dalam negeri dalam teori politik domestik dan perubahan kebijakan luar negeri. Dalam pendekatan tersebut, terdapat dua elemen pendukung, yakni: struktur konstitusional dan rezim politik, menjadi faktor pendukung dari analisis. Peranan kedua elemen ditunjukkan dari adanya fenomena kompetisi antar dua partai dominan di Belanda, sentimentalitas salah satu dari kedua partai dominan terhadap Turki, dan kesenjangan sosial di antara imigran Turki di Belanda dan masyarakat lokal. Ketiga fenomena tersebut ditambah dengan pengadaaan rally yang sangat dekat dengan diadakannya pemilu memicu Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan untuk menolak kedatangan kedua menteri. Menjaga keadilan dan kelancaran penyelenggaraan pemilu serta menjaga keamanan dan ketertiban publik merupakan kepentingan nasional yang berusaha dilindungi oleh Belanda. Keputusan menolak kedua Menteri Turki adalah upaya Belanda untuk melindungi kepentingan nasional mereka.

Kata-kata kunci: insiden diplomatik, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, Belanda, Turki

Rejection by the Dutch Government to two Turkish Ministers whom wanted to go to the city of Rotterdam for leading and overseeing a referendum campaign rally of their country is a decision that made the two countries' relationship in danger. This journal analyzes the reasons behind the Dutch Government's decision to reject the ministers using an analysis instrument which is domestic structure approach in domestic politics and the change of foreign policy theory. Within the approach, there are two supporting elements which are: constitutional structure and politic regimes, they support the analysis. The role of the two supporting elements are shown from the competition of two major parties in the Netherlands, the sentimentality of one of the two major parties with Turkey, and the social gap between the Turkish immigrants and the Dutchies. Those three phenomena added up with the campaign rally which was really close to the date of the Dutch Elections triggered the Dutch Government to release the decision to reject the Turkish Ministers. Protecting the fairness and fluency of the elections and also keeping the public security and order safe are the national interests that are tried to be protected by the Dutch. The decision to reject two Turkish Ministers was an attempt of the Dutchies to protect their national interests.

Keywords: diplomatic incident, national interest, foreign policy, Netherlands, Turkey

Pada 11 Maret 2017, telah terjadi insiden diplomatik di antara Belanda dan Turki berupa penolakan dua orang menteri dari Turki oleh pemerintah Belanda yang berwenang untuk

memasuki wilayah Belanda (Fahim 2017). Insiden tersebut diawali dengan adanya rencana pengadaan *rally* yang dilakukan oleh imigran Turki di Belanda di depan Kantor Konsulat Turki di Rotterdam, salah satu kota besar di Belanda. *Rally* tersebut dilakukan bertujuan mengampanyekan dukungan untuk sebuah referendum konstitusi Turki yang akan datang, di mana referendum tersebut akan mengubah sistem parlementer Turki menjadi presidensial karena mengkonsolidasikan kekuatan tiga badan legislatif menjadi satu cabang eksekutif di bawah kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Untuk memenangkan referendum, selain meminta dukungan seluruh warga Turki di dalam negeri, Erdogan juga meminta dukungan seluruh warga Turki yang tersebar di negara-negara lain, khususnya yang berada di negara-negara Eropa Barat, sehingga kampanye dalam bentuk *rally* pun gencar diadakan (Cullinane & Sterling 2017). Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang didapuk sebagai penanggungjawab pengadaan *rally* di luar Turki terbang langsung dari Meksiko menuju Belanda. Namun, usahanya berakhir dengan penolakan untuk memasuki kawasan Belanda dengan alasan bahwa kedatangannya akan membawa resiko terhadap ketertiban umum dan keamanan (Associated Press 2017).

Ketika mendengar berita bahwa Cavusoglu dilarang memasuki wilayah Belanda, rakyat Turki, terutama pendukung Erdogan, melakukan unjuk rasa di depan kantor Konsulat Belanda di kota Istanbul yang dihadiri juga oleh Erdogan (Rubin 2017). Dalam pidatonya saat memimpin unjuk rasa di Istanbul, Erdogan menuding Belanda sebagai negara fasis dan antek Nazi, serta dengan semangat menggebu, ia juga mengancam bahwa negaranya akan memblokir penerbangan dari Belanda untuk melewati Turki (Al-Jazeera 2017). Selain itu, penolakan tersebut memicu protes dari imigran Turki di Belanda, membuat mereka berkumpul dan berbondong-bondong mengadakan *rally* sendiri di depan kantor Konsulat Turki di Rotterdam tanpa didampingi Cavusoglu (Candar 2017). Menteri Kebijakan Keluarga dan Sosial Turki, Fatma Betul Sayan Kaya, yang sedang berada di Jerman pun bermaksud mengunjungi *rally* tersebut untuk berbicara pada massa yang seharusnya didampingi oleh Cavusoglu. Pada hari yang sama dalam waktu yang berbeda, Kaya pun berangkat dari Jerman menuju Rotterdam. Namun setelah sampai di tujuan, ia tidak diperkenankan memasuki kantor, dan kemudian dikirim kembali ke Jerman secara paksa di bawah pengawasan khusus (Associated Press 2017). Setelah pihak berwenang Belanda memulangkan paksa Kaya, pemerintah Turki memblokir seluruh residen milik Duta Besar Belanda untuk Turki, *chargé d'affaires*, dan Konsulat Jenderal yang berada di kota Ankara, Turki (Darroch 2017).

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, menyayangkan sikap resmi Turki yang dinilai telah melewati batas diplomatik. Ia juga menyatakan bahwa Turki perlu meminta maaf pada Belanda atas pernyataan yang menyatakan bahwa Belanda merupakan negara fasis dan antek Nazi (Darroch 2017). Menurutnya, pemerintah Turki memiliki sifat ganjil dan tidak bertanggung jawab, karena setelah mengetahui bahwa Menteri Luar Negeri Turki ditolak untuk mendaratkan pesawatnya di Belanda, Menteri Kebijakan Keluarga dan Sosial Turki tetap memutuskan untuk pergi ke Rotterdam, yang tentunya juga berujung pada penolakan (Government of the Netherlands 2017). Permasalahan diplomatik yang terjadi di antara kedua negara anggota NATO tersebut mencapai titik puncak ketika kedua belah pihak memutuskan hubungan mereka secara sementara (van Leeuwen 2018). Pemerintah Belanda dalam sebuah *press release* resminya menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah mereka dan Pemerintah Turki yang berwenang telah melakukan pertemuan dan negosiasi beberapa kali untuk membicarakan penyelesaian dan solusi terkait insiden diplomatik. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum menemukan titik terang bagi kedua belah pihak. Pemerintah Belanda pun secara resmi menarik Duta Besar Belanda untuk Turki beserta staf diplomatik lainnya (Government of the Netherlands 2018).

Sebelum insiden diplomatik terjadi, hubungan Belanda dengan Turki tercatat sangat baik. Kedua negara tersebut memiliki hubungan erat dalam kontak bilateral di tingkat pejabat senior dan politik. Kerja sama mereka mayoritas berkembang pesat di bidang

ekonomi, terutama pasar, investasi, dan *guest workers*. Banyak turis Belanda yang berwisata ke Turki, begitu pula sebaliknya. Bahkan terdapat banyak imigran berasal dari Turki yang tinggal dan bekerja di Belanda (Government of the Netherlands 2012). Dalam beberapa tahun terakhir, volume perdagangan antara Turki dan Belanda telah meningkat tiga kali lipat berkat letak geografis negara mereka yang strategis serta kepiawaian Belanda di bidang maritim. Di tahun 2012 lalu, Belanda dan Turki telah merayakan hari jadi ke-400 tahun dari hubungan bilateral mereka (Government of the Netherlands 2012). Bahkan, di tahun 2014, telah tercatat bahwa Belanda merupakan investor asing terbesar bagi Turki dalam beberapa tahun terakhir (The New Economy 2014).

Dalam kajian ini, pertanyaan besar penulis adalah: mengapa, dalam konteks politik domestik, pemerintah Belanda menolak dua menteri dari Turki masuk ke dalam wilayah negara mereka? Argumen sementara penulis untuk menjawab pertanyaan tersebut yakni penolakan Pemerintah Belanda terhadap dua Menteri Turki untuk memasuki wilayah mereka disebabkan oleh adanya kepentingan politik terkait pemilihan umum antara partai pemerintah melawan partai sayap kanan yang sentimen terhadap Turki. Kombinasi antara sentimen partai sayap kanan terhadap Turki dan kekacauan akibat dari *rally* dikhawatirkan memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga dapat berdampak kurang baik bagi penyelenggaraan pemilihan umum, terutama bagi partai pemerintah. Untuk menganalisis kasus insiden diplomatik ini, penulis menggunakan sebuah pendekatan yang digunakan sebagai faktor untuk menjelaskan keputusan Pemerintah Belanda untuk mengeluarkan kebijakan menolak kedua Menteri Turki, yakni pendekatan struktur dalam negeri milik Chris Alden dan Amnon Aran (2017). Adanya fenomena kompetisi antar dua partai dominan di Belanda pada Pemilihan Umum Belanda 2017, sentimentalitas salah satu dari kedua partai dominan terhadap Turki, serta kesenjangan sosial di antara imigran Turki di Belanda dan masyarakat lokal sangat memenuhi indikator dalam pendekatan struktur dalam negeri. Sedangkan rezim Parlemen yang dianut oleh Belanda melengkapi aturan elemen dalam pendekatan tersebut.

Secara resmi, Belanda memiliki dua puluh sembilan partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum terakhir yang diadakan pada 15 Maret 2017 kemarin. Akan tetapi, hanya terdapat sebanyak delapan partai saja yang tergolong sebagai partai besar dan sering disorot. Hal tersebut dikarenakan kedelapan partai besar tersebut memiliki jumlah perwakilan terpilih sebagai anggota Parlemen lebih banyak dibandingkan partai-partai tersisa (Nederlandse Omroep Stichting 2017). Kedelapan besar partai tersebut yakni Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Partai Kebebasan (PVV), Partai Penyeru Demokratis Kristen (CDA), Partai Demokrat 66 (D66), Partai Hijau-Kiri (GroenLinks), Partai Sosialis (SP), Partai Buruh (PvdA), dan Partai Serikat Kristen (CU) (Nederlandse Omroep Stichting 2017). Seorang penstudi dan pengamat politik Belanda, Michiel Luining (2017), memaparkan bahwa pemilu 2017 masih berkaitan erat dan fokus pada pemerintahan Uni Eropa, meskipun dalam perdebatan resmi antar partai selama kampanye pemilu Belanda Uni Eropa jarang disebut. Kampanye partai politik Belanda masih berkaitan erat dengan pemerintahan UE dikarenakan visi dan misi mereka dapat dikaitkan dengan lima skenario yang tertulis dalam *White Paper on the Future of Europe: Reflections and scenarios for the EU27 by 2025* diterbitkan oleh Komisi UE pada 1 Maret 2017 (Luining 2017).

Sejatinya, *highlight* dari kompetisi antar partai politik dalam Pemilu Belanda 2017 adalah kompetisi antara Partai VVD dan PVV. Kedua partai tersebut merupakan dua partai terbesar di Belanda dan memiliki visi-misi yang sangat bertolak belakang dalam lingkup sosial-budaya. Partai VVD merupakan partai pemerintah yang pro terhadap UE, dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda yang sedang menjabat, Mark Rutte (Luining 2017; Deloy 2017). Sedangkan PVV merupakan partai sayap kiri sekaligus partai oposisi yang skeptis terhadap UE, dipimpin oleh politisi fenomenal Geert Wilders (Norsk Senter for Forskningsdata t.t.). Kampanye Wilders berupa gerakan menghentikan pertumbuhan Islam dan mengurangi

imigran dari negara non-Barat (Shahrestani et. al. 2017), sedangkan Rutte memiliki program yang sangat terbuka dengan multikulturalisme dan imigran maupun pegungsi, dengan catatan mereka (muslim dan imigran) harus tetap beradaptasi, menerima, dan mengamalkan tata tertib dan peraturan Belanda (Boztas 2017). Selain itu, adanya fakta bahwa Wilders merupakan mantan anggota Partai VVD dan Rutte yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda sebanyak dua kali dari dua pemilu yang diadakan pada tahun 2010 dan 2012 menjadi tambahan *highlight* dari kompetisi antara kedua partai raksasa (Vollard 2016).

Wilders merupakan seorang yang memiliki sentimen buruk terhadap Turki, baik negara beserta imigrannya yang tersebar di Eropa, termasuk Belanda (Osborne 2017). Wilders gencar mengkampanyekan gerakan membatasi pertumbuhan Islam dan angka orang muslim di Eropa (Shahrestani et. al. 2017). Dalam salah satu pidato resminya, ia secara gamblang mengatakan bahwa para imigran Turki seharusnya keluar dari Belanda dan kembali ke negara asal mereka (Osborne 2017). Ia juga menyatakan bahwa Turki merupakan negara yang tidak akan dapat diterima untuk bergabung menjadi salah satu anggota Uni Eropa karena latar belakang mereka yang Islami dinilai tidak kompatibel dengan kepribadian UE (Wilders 2015). Gerakan tersebut mendapat banyak dukungan dari publik Belanda, karena mereka berpikiran bahwa Islam merupakan ideologi bersifat totaliter, berbahaya, dan penuh kekerasan, yang berkedok sebagai agama (Kruis 2017). Hal tersebut dibuktikan dari adanya fakta bahwa PVV menjadi salah satu partai raksasa berdampingan dengan Partai VVD.

Tiga hari sebelum *rally* kampanye diadakan, Wilders melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki di kota Den Haag, bersama beberapa rekan sesama partai. Wilders mengetahui rencana pengadaan kampanye di Rotterdam, kemudian memutuskan untuk melakukan demonstrasi untuk menunjukkan penolakan kedatangan Menteri Turki dan pengadaan kampanye di Belanda (Jorritsma 2017). Tidak tanggung-tanggung, Wilders membawa sebuah spanduk bertuliskan “Menjauh dari negara kami. Ini adalah tanah kami!” dalam bahasa Turki dan Belanda dan membentangkannya di depan Kedutaan Besar Turki (Pieters 2017). Hingga pada 11 Maret 2017, pukul 11:20, melalui media sosial *Twitter* pribadinya, Wilders membalas tulisan Rutte “Iedereen syp retweeten: @MinPres Rutte laat de Turkse minister het land niet in, laat hem hier NIET landen!!” (Rutte, jangan biarkan Menteri Turki masuk kemari, jangan biarkan ia mendarat disini!). Beberapa jam kemudian, melalui wawancara dengan media Al-Jazeera, Wilders mengklaim bahwa keputusan menolak pendaratan pesawat Cavusoglu oleh Rutte merupakan hasil dari desakan dirinya bersama dengan parta miliknya (Pieters 2017).

Fenomena selanjutnya yang akan dibahas adalah adanya kesenjangan sosial antara imigran Turki dan penduduk asli Belanda. Telah menjadi rahasia umum di Belanda bahwa imigran Turki merupakan pendatang yang kurang disukai dan diterima oleh mereka, terutama kepada imigran Turki generasi kedua dan generasi-generasi berikutnya (UCL t.t.). Hal tersebut berkaitan erat dengan fenomena Islamofobia yang menyebar di berbagai negara Barat, sebuah dampak negatif dari adanya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat (European Stability Initiative t.t.). Banyak masyarakat Belanda yang merasa skeptis pada imigran Turki, karena mayoritas para imigran adalah muslim. Terhitung sebesar 95% dari jumlah orang-orang keturunan Turki di Belanda menyatakan bahwa mereka memeluk agama Islam (Schmeets 2009). Adanya fakta bahwa jumlah imigran Turki di Belanda sangatlah banyak semakin memperkeruh skeptisisme mereka, hingga membuat mereka memiliki pikiran bahwa banyaknya jumlah imigran Turki akan mengakibatkan terjadinya penyebaran Islamisasi di negara mereka (Harvey 2017). Umumnya, mereka berpandangan bahwa semua umat Islam adalah teroris dan berbahaya.

Lebih lanjut, pemicu dari ketidak sukaan warga asli Belanda terhadap imigran Turki generasi kedua dan berikutnya disebabkan keengganan para imigran Turki untuk berintegrasi dengan kebudayaan Belanda (UCL t.t.). Padahal, pemerintah Belanda

mewajibkan bagi setiap imigran yang ingin tinggal di wilayah mereka selama lebih dari tiga bulan, maka harus berintegrasi dengan budaya dan masyarakat Belanda. Mereka percaya bahwa dengan mengetahui dan mempelajari bahasa mereka merupakan bentuk dasar dari berintegrasi (Government of the Netherlands t.t.). Sejatinya, Turki termasuk dalam daftar negara pengecualian untuk mengikuti *inburgeringsexamen* bagi warganya yang berniat menetap di Belanda lebih dari tiga bulan. Walau begitu, mereka harus tetap belajar Bahasa Belanda bagi keberlangsungan kehidupan sosial mereka di sana. Imigran Turki diberi waktu selama satu tahun untuk menempuh pendidikan bahasa dan budaya Belanda sebelum mereka mulai bekerja (Government of the Netherlands t.t.). Akan tetapi, mereka tetap enggan untuk berintegrasi karena mereka merasa bahwa kebudayaan Belanda sangat berbeda latar belakangnya dengan kebudayaan nenek moyang mereka (UCL t.t.). Mereka menilai bahwa kebudayaan tersebut tidak sesuai untuk diikuti. Selain itu, mereka dikenal sangat melekat dengan budaya dan bahasa mereka sendiri (Government of the Netherlands 2006).

Keengganan untuk berintegrasi memicu munculnya kesenjangan sosial antara kedua kubu, kubu *native* dan kubu imigran. Anak-anak imigran Turki cenderung memulai sekolah dengan persiapan paling kurang bila dibandingkan dengan anak-anak *native*. Seringkali mereka memulai perjalanan sekolah dengan sedikit sekali pengetahuan tentang bahasa Belanda. Padahal, bahasa pengantar sehari-hari di sekolah lokal tentu saja menggunakan bahasa Belanda. Mereka juga cenderung lebih memilih disiplin dan kursus yang lebih pendek dan mudah, dan lebih sering meninggalkan, dikeluarkan, atau menyelesaikan sekolah tanpa kualifikasi apapun (Crul & Schneider 2009). Kurang maksimalnya perjalanan edukasi imigran Turki di Belanda pun berujung hingga mereka dewasa. Ketika mereka menginjak dunia kerja, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, mereka harus berjuang lebih keras. Hal tersebut dikarenakan kemampuan dan pengetahuan bahasa Belanda mereka yang buruk, tingkat pendidikan yang ditempuh relatif rendah, pengalaman kerja yang terbatas, dan diskriminasi sosial (UCL t.t.).

Adanya kombinasi antara penyelenggaraan pemilu, salah satu partai dominan yang sentimen terhadap Turki, dan buruknya pandangan masyarakat Belanda terhadap *Dutch-Turks* menjadi alasan yang kompleks bagi pemerintah Belanda untuk menolak pengadaan *rally* dan kedatangan Menteri Turki. Mereka berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka yang berupa menjaga keadilan, kelancaran, dan ketertiban acara pemilu. Pemerintah Belanda menilai bahwa pengadaan *rally* kampanye oleh Turki akan menimbulkan kekacauan yang berujung membuat pandangan masyarakat Belanda terhadap Turki beserta diasporanya semakin menurun. Menurunnya persepsi mereka berpotensi menambah dukungan kepada Wilders beserta partainya, karena mereka memiliki visi-misi yang searah sehingga PVV berkesempatan untuk meraup suara lebih banyak dari situasi tersebut. Untuk mencegah ketidakadilan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk tidak mengizinkan rencana kampanye dan kedatangan Menteri Turki. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan kecil bahwa argumentasi penulis adalah benar. Telah disebutkan bahwa PVV skeptis terhadap UE, sehingga bila PVV berhasil memenangkan pemilu maka *national values* negara mereka dalam ranah internasional pun akan mengalami penurunan.

Penulis telah mengajukan argumentasi sementara bahwa kebijakan luar negeri Pemerintah Belanda berupa menolak Menteri Turki untuk memasuki wilayah Belanda disebabkan oleh adanya kepentingan politik terkait pemilihan umum antara partai pemerintah melawan partai sayap kanan yang sentimen terhadap Turki. Faktor tersebut berkaitan dengan teori politik domestik dan perubahan kebijakan luar negeri. Adanya fakta bahwa Rutte sendiri yang memberikan perintah dan sistem pemerintahan Belanda yang menganut sistem Parlementer sesuai dengan elemen rezim politik dalam pendekatan struktur domestik. Dalam sebuah negara penganut sistem Parlementer, pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dilakukan oleh Perdana Menteri selaku pemimpin negara tersebut

(Morin & Paquin 2018). Peranan struktur konstitusional dalam menganalisis kajian ini terletak pada fenomena kesenjangan sosial antara imigran Turki dan masyarakat asli Belanda. Fenomena tersebut awalnya hanya tersebar di tingkatan masyarakat saja. Kemudian, seiring makin maraknya angka keengganan untuk berintegrasi, fenomena tersebut menjadi isu yang sering dibahas dalam tingkat perpolitikan Belanda. Bukti dari isu tersebut telah sampai di tingkat perpolitikan berupa adanya partai populis sayap kanan, PVV, yang secara terang-terangan menunjukkan ketidak sukaan mereka terhadap imigran Turki. Selain itu, adanya gestur-gestur kecil juga menjadi penambah bukti, seperti bagaimana Perdana Menteri Mark Rutte memanggil para imigran Turki beserta keturunannya dengan sebutan *Turks*, namun memanggil penduduk asli Belanda dengan sebutan *Dutch citizens* (Fatma 2017).

Kebenaran argumentasi penulis semakin kuat dibuktikan oleh kemenangan Partai VVD pada Pemilu Belanda 2017. Keputusan Rutte untuk tidak mengizinkan pengadaaan *rally* dan menolak kedatangan Menteri Turki membawa partainya ke posisi pertama pada hasil pemilu. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi mendapat tekanan asing dan diterpa berbagai isu sosial-politik, Belanda tetap berdiri tegak dan kuat untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Secara tidak langsung, insiden diplomatik Belanda-Turki di tahun 2017 memberikan kesempatan pada Rutte dan pemerintah Belanda untuk membuktikan kepada rakyat bahwa merekalah yang benar-benar melindungi serta membela kepentingan Belanda di tengah isu yang kompleks. Meskipun Partai VVD berhasil mencapai kemenangan pada pemilu 2017, banyaknya jumlah kursi yang didapat, bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di tahun 2012, mengalami penurunan drastis. Sebaliknya, jumlah kursi yang didapat oleh PVV mengalami kenaikan dibandingkan dengan pemilu tahun 2012 (Pieters 2017).

Pada akhirnya, insiden diplomatik Belanda-Turki jelas memunculkan tanggapan dari masyarakat Belanda. Sebuah halaman statistik *online* terkemuka, Statista, mengadakan survei ditujukan kepada penduduk Belanda untuk menanyakan tanggapan mereka mengenai keputusan pemerintah menolak kedua Menteri Turki. Dari sebanyak 25.000 orang Belanda yang disurvei, 93% dari jumlah keseluruhan responden menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah mereka untuk menolak dua Diplomat Turki masuk ke wilayah mereka. Sebesar 5% responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk melihat kedua negara bekompromi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sisanya, sebesar 2% menyatakan tidak setuju dengan tindakan pemerintah untuk menolak (Statista 2017). Selain itu, salah satu kantor berita masif Belanda, NOS, bekerja sama dengan lembaga survei Ipsos untuk mengadakan survei ditujukan kepada masyarakat Belanda tentang dampak insiden diplomatik terhadap pemilu 2017 (NOS 2017). Survei ini dilakukan paska pemilu diselenggarakan. Para responden diberi pertanyaan ‘apakah konflik antara Belanda dan Turki berperan penting terhadap pemilu?’ dan empat pilihan jawaban, yakni: berperan besar, sedikit berperan, tidak berperan, dan tidak tahu (NOS 2017).

Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 41% dari jumlah total responden menyatakan bahwa insiden diplomatik tidak memiliki peranan sama sekali terhadap pemilu Belanda 2017. Sebanyak 29% responden menyatakan bahwa insiden tersebut memiliki sedikit peran. Sebaliknya, sebesar 26% responden menyatakan bahwa insiden tersebut memiliki peranan besar pada pemilu. Sisanya, sebesar 4% responden tidak mengetahui apakah insiden diplomatik memiliki peran atau tidak terhadap pemilu (NOS 2017). Hasil survei NOS-Ipsos menjadi pendukung prediksi terakhir *Peilingwijzer poll*, sebuah lembaga prediksi pemilu resmi di Belanda, yang dikeluarkan sehari sebelum pemilu diadakan. Prediksi ditentukan dari penilaian debat antara Rutte dan Wilders di hari yang sama. Jajak pendapat yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun TV lokal membahas mengenai konflik dengan Turki akan berpengaruh pada *rating* mereka atau tidak (Cluskey 2017). *Peilingwijzer* mempublikasikan prediksi akhir kedua pemimpin partai, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prediksi ketika perdebatan berlangsung. Namun peningkatan tersebut

sangatlah minim. Dalam prediksi akhir, Partai VVD berada di antara 24 dan 28 kursi di *Peilingwijzer*, sedangkan PVV berdiri di antara 20 dan 24 kursi. Meskipun minim jumlah peningkatan prediksi dukungan akhir, perolehan PVV masih lebih rendah dibandingkan dengan perolehan beberapa minggu sebelumnya (Pieters 2017).

Perkembangan terakhir mengenai hubungan Belanda dan Turki paska insiden diplomatik menunjukkan bahwa kedua belah pihak hingga saat ini menghentikan sementara hubungan diplomatik mereka. Pada tanggal 5 Februari 2018 di halaman resminya, pemerintah Belanda mempublikasikan penjelasan bahwa kedua belah pihak telah berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, akan tetapi solusi tersebut belum ditemukan. (Government of the Netherlands 2018). Paska penolakan kedua Menteri Turki terjadi, Presiden Erdogan secara berkepanjangan menyalahkan Belanda dan menyatakan betapa buruknya pemerintahan mereka, menggunakan negara naungan Mark Rutte tersebut menjadi pembahasan utamanya dalam berkampanye (Keinon 2017). Bahkan Menlu Turki, Cavusoglu, memberitahukan kepada awak media bahwa cepat atau lambat, bila Eropa terus-menerus mendukung Rutte dan mengabaikan penyebaran *Geert Wilders Effect*, perang keagamaan akan tercetus di Eropa (Reuters 2017). Dilansir dari salah satu surat kabar nasional Turki, Hurriyet Daily News (2017), ketika pertemuan G20 diadakan di Hamburg bulan Juli 2017 lalu, Perdana Menteri Belanda dan Presiden Turki berada dalam satu meja yang sama. Namun, keduanya sekalipun tidak nampak berkomunikasi dengan satu sama lain. Akan tetapi, komunikasi antar dua negara masih terjalin di tingkat kementerian.

Sementara itu, sesungguhnya dampak terberat dari terjadinya insiden diplomatik ini ditanggung oleh para imigran Turki. Identitas para *Dutch-Turks* di Belanda telah menjadi problematika nasional selama kurang lebih dua dekade (Bahceli 2018). Mereka telah cukup terpojokkan karena adanya kesenjangan sosial dan pandangan negatif dari masyarakat Belanda, sehingga terjadinya insiden diplomatik semakin membuat mereka lebih tertekan dan pandangan negatif pun semakin meningkat. Selain itu, dampak dari *Geert Wilders Effect* yang sangat menunjukkan bahwa mereka adalah termasuk dalam kelompok 'kurang disukai' tidak menyelamatkan posisi mereka dalam isu kesenjangan sosial. Paska insiden terjadi, perdebatan mengenai identitas kewarganegaraan mereka kembali muncul ke permukaan. Perdebatan tersebut berujung pada penangguhan status kewarganegaraan ganda mereka (Bahceli 2018). Penghentian sementara hubungan diplomatik Belanda-Turki juga mengancam status mereka terkait kewarganegaraan ganda. Tidak peduli seberapa baik usaha mereka untuk berintegrasi, bahkan terbaik dibandingkan imigran-imigran bangsa lain, kedudukan mereka sebagai kelompok minoritas yang buruk akan selalu tersemat.

Daftar Pustaka

Buku

- Alden, Chris & Aran, Amnon. *Foreign Policy Analysis: New Approaches*, 2nd edition. Oxon: Routledge, 2017.
- Crul, Maurice & Schneider, Jens. *Children of Turkish Immigrants in Germany and the Netherlands: The Impact of Differences in Vocational and Academic Tracking Systems*. Teachers College Record, 2009.
- Luining, Michiel. *Dutch political parties on the European Union*. Clingendael: Netherlands Institute of International Relations, 2017.
- Morin, Jean-Frédéric & Paquin, Jonathan. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Palgrave Macmillan, 2018.

Jurnal

Bahceli, Yoruk. "Dutch-Turkish Identity: A very Dutch Affair". *Turkish Policy Quarterly*, Vol.16 No. 4 (2018).

Artikel Daring

Deloy, Corinne. *Netherlands – General Elections*. 17 Maret 2017. <https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1697-the-people-s-party-for-freedom-and-democracy-vvd-led-by-outgoing-prime-minister-mark-rutte-easily-pulls-ahead-in-the-general-elections-in-the-netherlands> (diakses 11 Maret 2018).

European Stability Initiative. *Strict but fair?*. <http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=194> (diakses 18 Maret 2018).

Fatma. *The good, the bad, and the Dutch Turks*. 14 Maret 2017. <http://dutchturks.nl/the-good-the-bad-and-the-dutch-turks/> (diakses 25 April 2018).

Government of the Netherlands. *Integration of newcomers*. <https://www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands/integration-of-newcomers> (diakses 17 Maret 2018).

Norsk Senter for forskningsdata. *Netherlands – Political Parties*. http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/netherlands/parties.html (diakses 11 Maret 2018).

NOS. *Tweede Kamerverkiezingen 2017*. <https://lfverkiezingen.appspot.com/nos/widget/main.html> (diakses 11 Maret 2018).

NOS. *Waarom stemden mensen wat ze stemden?*. 16 Maret 2017. <https://nos.nl/artikel/2163482-waarom-stemden-mensen-wat-ze-stemden.html> (diakses 27 April 2018).

UCL. *Common problems of immigrants*. http://www.ucl.ac.uk/dutchstudies/an/SP_LINKS_UCL_POPUP/SPs_english/multicultureel_gev_ENG/pages/problemen.html (diakses 20 Oktober 2017).

UCL. *History of Immigration in the Netherlands*. http://www.ucl.ac.uk/dutchstudies/an/SP_LINKS_UCL_POPUP/SPs_english/multicultureel_gev_ENG/pages/geschiedenis_imm.html (diakses 15 Maret 2018).

Vollard, Hans. *The 2017 Dutch parliamentary elections: A fragmented picture as Rutte and Wilders draw their battle lines*. 26 Oktober 2016. <http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/10/11/2017-dutch-elections-rutte-and-wilders-draw-their-battle-lines/> (diakses 11 Maret 2018).

Laporan

Government of the Netherlands. *Contemporary Turkish culture in the Netherlands and in Turkey*. <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/01/04/contemporary-turkish-culture-in-the-netherlands-and-in-turkey-engelse-versie/turkse-cultuur-eng.pdf> (diakses pada 30 Maret 2018).

Government of the Netherlands. *Foreign policy: in the interests of Dutch citizens and businesses*. 18 September 2012. <https://www.government.nl/latest/news/2012/09/18/foreign-policy-in-the-interests-of-dutch-citizens-and-businesses> (diakses 27 Mei 2018).

- Government of the Netherlands. *Government statement concerning Turkish minister Kaya's escorted departure*. 12 Maret 2017. <https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte/news/2017/03/12/government-statement-concerning-turkish-minister-kaya%E2%80%99s-escorted-departure> (diakses 18 Oktober 2017).
- Government of the Netherlands. *Statement of the ministry of Foreign Affairs of the Netherlands on the bilateral relation with Turkey*. 5 Februari 2018. <https://www.government.nl/latest/news/2018/02/05/statement-of-the-ministry-of-foreign-affairs-of-the-netherlands-on-the-bilateral-relations-with-turkey> (diakses 12 April 2018).
- Government of the Netherlands. *The Netherlands and Turkey: 400 years of diplomatic relations*. 20 Februari 2012. <https://www.government.nl/latest/news/2012/02/20/the-netherlands-and-turkey-400-years-of-diplomatic-relations> (diakses 18 Oktober 2017).
- Schmeets, Hans. "Herziene versie: Minder vaak naar kerk of moskee". *Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)*. 29 Juli 2009. <https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2009/31/herziene-versie-minder-vaak-naar-kerk-of-moskee> (diakses 17 Maret 2018).
- Statista. *To what extent do you agree with the following statement: "It is good that the Netherlands has bared its teeth against Turkey"*. Maret 2017. <https://www.statista.com/statistics/686012/opinions-on-the-dutch-response-to-turkey-s-campaign-abroad-in-the-netherlands/> (diakses 27 April 2018).

Artikel Berita Daring

- Al Jazeera. *Turkey tells Dutch ambassador: Don't hurry back*. 12 Maret 2017. <http://www.aljazeera.com/news/2017/03/turkey-tells-dutch-ambassador-don-hurry-170311201322798.html> (diakses 18 Oktober 2017).
- Associated Press. "Turkey-Dutch relations shatter after Turkish visits banned". *Daily Mail*. 11 Maret 2017. <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4303708/Turkish-foreign-minister-determined-visit-Netherlands.html> (diakses 18 Oktober 2017).
- Boztas, Senay. "Anti-Islam Dutch MP Geert Wilders found guilty of inciting racial discrimination". *The Telegraph*. 9 Desember 2016. <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/09/anti-islam-dutch-mp-geert-wilders-found-guilty-discrimination/> (diakses 26 April 2018).
- Candar, Cengiz. "Turkey's diplomatic relations with Europe take a nosedive". *Al Monitor*. 12 Maret 2017. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-europe-netherlands-germany-rally-crisis.html#ixzz4vs6QkFK7> (diakses 18 Oktober 2017).
- Cluskey, Peter. "Turkey row has little impact on Dutch rivals' ratings – poll". *The Irish Times*. 13 Maret 2017. <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/turkey-row-has-little-impact-on-dutch-rivals-ratings-poll-13009009> (diakses 27 April 2018).
- Cullinane, Susannah & Sterling, Joe. "Why are Turkey and the Netherlands clashing?". *CNN*. 15 Maret 2017. <http://edition.cnn.com/2017/03/13/europe/Turkish-dutch-tensions-explained/index.html> (diakses 18 Oktober 2017).
- Darroch, Gordon. "Netherlands 'will pay the price' for blocking Turkish visit- Erdoğan". *The Guardian*. 12 Maret 2017. <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/12/netherlands-will-pay-the-price-for-blocking-turkish-visit-erdogan> (diakses 18 Oktober 2017).

- Fahim, Kareem. "Netherlands cancels Turkish foreign minister's visit in spiraling feud between Europe and Turkey". *The Washington Post*. 11 Maret 2017. https://www.washingtonpost.com/world/netherlands-cancels-visit-by-turkish-foreign-minister-in-spiraling-feud-between-europe-and-turkey/2017/03/11/acc2c8ba-0655-11e7-a391-651727e77fc0_story.html?utm_term=.82b921931e56 (diakses 18 Oktober 2017).
- Harvey, Oliver. "THE DUTCH WILL BE NEXIT Meet Geert Wilders, the Donald Trump of The Netherlands who wants to lead his country out of the EU and shut the borders to Muslims". *The Sun*. 28 Januari 2017. <https://www.thesun.co.uk/news/2724868/meet-geert-wilders-the-donald-trump-of-the-netherlands-who-wants-to-lead-his-country-out-of-the-eu-and-shut-the-borders-to-muslims/> (diakses 18 Maret 2018).
- Hurriyet Daily News. *Dutch premier seeks to fix 'cold' relations with Turkey*. 23 Desember 2017. <http://www.hurriyetdailynews.com/dutch-premier-seeks-to-fix-cold-relations-with-turkey-124640> (diakses 27 April 2018).
- Jorritsma, Elsje, et. al. "Waarom laten ze die vrouw niet gewoon binnen?". *NRC Nieuws*. 14 Maret 2017. <https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/14/waarom-laten-ze-die-vrouw-niet-gewoon-binnen-7378796-a1550328> (diakses 13 April 2018).
- Keinon, Herb. "The Netherlands, not Israel, Now Stars as Erdogan's Election Scapegoat". *The Jerusalem Post*. 14 Maret 2017. <https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Analysis-The-Netherlands-not-Israel-now-stars-as-Erdogans-election-scapegoat-484120> (diakses 27 April 2018).
- Kruis, Sebastian. "Telegraaf interview Geert Wilders: In my opinion islam is not a religion". *Geert Wilders official web-blog*, 16 September 2017. <https://www.geertwilders.nl/in-de-media-mainmenu-74/nieuws-mainmenu-114/94-english/2068-telegraaf-interview-geert-wilders-in-my-opinion-islam-is-not-a-religion> (diakses 20 Oktober 2017).
- Osborne, Samuel. "Geert Wilders: Far-right Dutch PM frontrunner says 'Islam and freedom are not compatible'". *Independent*. 22 Februari 2017. <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/geert-wilders-dutch-pm-frontrunner-far-right-islamophobic-freedom-a7593466.html> (diakses 20 Oktober 2017).
- Pieters, Janene. "Revised Vote Totals Show Extra Gains for VVD, Wilders; HealthMin. Schippers to Help Form Coalition". *NL Times*. 16 Maret 2017. <https://nltimes.nl/2017/03/16/revised-vote-totals-show-extra-gains-vvd-wilders-health-min-schippers-help-form-coalition> (diakses 26 April 2018).
- Pieters, Janene. "Wilders Joins Turkish Embassy Protest in the Hague". *NL Times*. 8 Maret 2017. <https://nltimes.nl/2017/03/08/wilders-joins-turkish-embassy-protest-hague> (diakses 26 April 2018).
- Reuters. "Turkish Minister Warns: Europe Headed for 'Religion Wars'". *The Jerusalem Post*. 16 Maret 2017. <https://www.jpost.com/International/Turkish-minister-warns-Europe-headed-for-religion-wars-despite-Wilders-stumble-484360> (diakses 27 April 2018).
- Rubin, Alissa J. "Erdogan Calls Dutch 'Nazi Remnants' After Turkish Minister Is Barred". *The New York Times*. 11 Maret 2017. <https://www.nytimes.com/2017/03/11/world/europe/turkey-netherlands-ban-referendum.html> (diakses 18 Oktober 2017).
- Shahrestani, Vin, et. al. "Dutch election 2017: Who is Geert Wilders, the 'Dutch Trump'?". *The Telegraph*. 15 Maret 2017.

<http://www.telegraph.co.uk/news/o/dutch-election-2017-geert-wilders/>
(diakses 20 Oktober 2017).

The New Economy. *Investors become increasingly drawn to Turkey*. 29 Desember 2014. <https://www.theneweconomy.com/business/investors-become-increasingly-drawn-to-turkey> (diakses 18 Oktober 2017).

Van Leeuwen, Abuzer. "The Netherlands and Turkey have officially broken up". *Dutch Review*. 5 Februari 2018. <https://dutchreview.com/international-news/netherlands-turkey-officially-broken/> (diakses 12 April 2018).

Video

Wilders, Geert. *Geert Wilders tells Turks: Turkey not welcome in Europe*. 4 Desember 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=Y5EoMdwkpgY> (diakses 20 Oktober 2017).